

## LAMPIRAN 1

<b>Rumusan Masalah 1 “Dampak implementasi akuntansi berbasis akrual</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimanakah Implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual yang di tinjau dari aspek sumber daya manusia</li><li>2. Apakah ada hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan Rahong Utara dalam mengimplementasikan (SAP) Standar akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP No 71 Tahun 2010.</li><li>3. Bagaimana Perubahan yang terjadi terhadap implementasi standar akuntansi berbasis dalam penyusunan Laporan keuangan basis akrual di kantor camat Rahong Utara</li><li>4. Apa permasalahan yang terjadi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual</li><li>5. langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh pemerintah di kantor camat Rahong Utara dalam penerapan PP 71 ini</li><li>6. menurut bapak sendiri lebih sulit yang mana, apakah SAP berbasis kas atau SAP berbasis akrual.</li><li>7. kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam mengimplementasikan standar akuntansi berbasis akrual ini.</li><li>8. Apa saja jenis laporan keuangan pemerintah kecamatan yang harus disampaikan</li><li>9. Apakah pernah mengalami kesalahan saat menyusun dan menyajikan laporan keuangan</li><li>10. Kesalahan seperti apakah saat menyusun laporan keuangan</li></ol>
<b>Rumusan Masalah 2” Hambatan implementasi standar akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP No 71 Tahun 2010</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah pegawai yang bekerja dikantor camat ini semua berlatar pendidikan Akuntansi</li><li>2. Apa saja syarat untuk melakukan koreksi setelah menyusun Laporan Keuangan</li><li>3. Apa yang menyebabkan pemerintah kecamatan sulit melaksanakan implementasi akuntansi berbasis akrual</li></ol>
<b>Rumusan Masalah 3. Upaya Implementasi standar akuntansi berbasis akrual</b>

1. Apakah memiliki loyalitas terhadap pelaksanaan implementasi standar akuntansi berbasis akrual tersebut.
2. Bagaimanakah Upaya yang dilakukan agar bisa memahami akuntansi berbasis akrual
3. Mengapa standar Akuntansi pemerintah lebih relevan jika memakai basis akrual
4. Mengapa standar akuntansi berbasis akrual sangat dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan
5. Seperti apa metode pencatatan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan keuangan dipemerintah
6. Bagaimana upaya pemerintah terhadap Kesalahan penerapan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan tersebut
7. Apakah saat menyusun laporan keuangan sudah sesuai atau masih ada hambatan
8. Mengapa standar akuntansi pemerintah sangat diperlukan



## LAMPIRAN 2



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jln. Yos Sudarso No. 14, Kgl. Mbaumuku, Kec. Langke Rembong*  
Email : [dpmpptspkabmanggarai08@gmail.com](mailto:dpmpptspkabmanggarai08@gmail.com)

### **IZIN PENELITIAN**

Nomor : 503/DPMPPTSP/555/IP/VII/2023

- Berdasarkan : Surat Pengantar dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Undiksha Singaraja, Nomor : 1275/UN48.13.1/DL/2023 tanggal 10 Juli 2023.  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.  
Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dikeluarkan Surat Izin Penelitian.  
Mengingat : UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dengan ini memberikan :

### **IZIN PENELITIAN**

#### **Kepada :**

Nama : Rofina Dalman  
NIM : 1917051112  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Fakultas/Prodi : Ekonomi / Akuntansi  
Universitas : Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

#### **Untuk melakukan penelitian di :**

Judul : " Analisis Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kantor Camat Rahong Utara) "

Lokasi : Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai  
Pengikut :  
Lama Penelitian : 31 Juli 2023 s/d 14 Agustus 2023

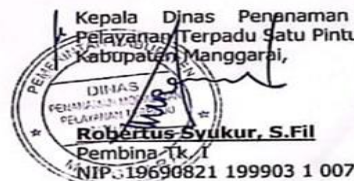
#### **Dengan ketentuan :**

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kegiatan kepada Camat setempat;
2. Selama melakukan kegiatan, yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu KAMTIBMAS setempat;
4. Wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur NTT dan Bupati Manggarai;
5. Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah ataupun swasta yang dihubungi agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Setelah selesai penelitian, wajib melampirkan Surat keterangan Selesai Penelitian dari Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan dan diharapkan agar pihak-pihak yang mendapat tembusan surat ini memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini, maka akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ruteng, 26 Juli 2023


Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Manggarai,



#### **Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai di Ruteng;
2. Camat Rahong Utara di Nanu;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Undiksha di Singaraja;

## LAMPIRAN 3

**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**KECAMATAN RAHONG UTARA**  
**PURANG**

---

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
Nomor: 070/121/KEC.RAHUT/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fransiskus Jen, S.Sos  
NIP : 19810612 201001 1 029  
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I  
Jabatan : Camat

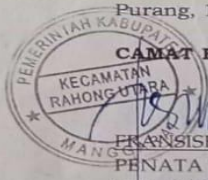
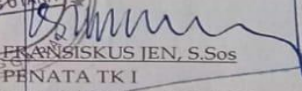
dengan ini menerangkan:

Nama : Rofina Daiman  
NIM : 1917051112  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Fakultas/Prodi : Ekonomi/Akuntansi  
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kecamatan Rahong Utara, Kab. Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor ijin penelitian 503/DPMPSTP/555/IP/VII/2023 dengan judul penelitian: **Analisis Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan ( Studi Kasus pada Kantor Kecamatan Rahong Utara )** sejak tanggal 31 Juli s/d 14 Agustus 2023

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk urusan selanjutnya.

Purang, 14 Agustus 2023

**CAMAT RAHONG UTARA,**  
  
FRANSISKUS JEN, S.Sos  
PENATA TK I  
NIP: 19810612 201001 1 029

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Manggarai di Ruteng (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Manggarai di Ruteng;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Manggarai di Ruteng;
4. Dekan Fakultas Ekonomi/Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja di Bali

CS Diambil dengan CamScanner

### LAMPIRAN 3

### DOKUMENTASI





